

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan dampak pada sistem pengelolaan atau manajemen dari berbagai bidang pemerintahan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah dengan UU No.32 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah, dan secara teknis diatur dalam PP No. 33 Tahun 2001 menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan penggeseran kewenangan dan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan.

Otonomi bidang pendidikan diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian sekolah dengan menghadirkan sistem pengelolaan yang berbasis pada sekolah. Menurut Nurkolis (2019), pengelolaan pendidikan yang berbasis pada sekolah dikenal dengan istilah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Hal tersebut juga dimuat dalam Pasal 51 UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pengadaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah didasarkan pada standar pelayanan minimum dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Munculnya paradigma/model baru tentang manajemen berbasis sekolah (MBS) yang bertumpu pada penciptaan iklim yang demokratis dan pemberian kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan

secara efisien dan berkualitas. Dengan demikian dapat mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah.

Sistem pengelolaan sekolah yang dilakukan dengan Manajemen Berbasis Sekolah mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2000. Implementasi MBS di Indonesia secara rutin setiap tahun dievaluasi. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Atas dan Perguruan Tinggi (2021) melaporkan hasil evaluasi dari penerapan MBS di Indonesia dengan melihat lima indikator yaitu, 1) peningkatan manajemen sekolah yang lebih transparan, partisipatif, demokratis, dan akuntabel, 2) peningkatan mutu pendidikan, 3) menurunnya tingkat putus sekolah, 4) peningkatan implementasi pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan 5) peningkatan peran serta masyarakat terhadap pendidikan di sekolah menengah atas.

Evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Atas dan Perguruan Tinggi (2021) menyebutkan bahwa, pelaksanaan MBS masih belum optimal, terutama pada tiga indikator yang digunakan, yaitu peningkatan manajemen sekolah yang lebih transparan, partisipatif, demokratis, dan akuntabel yang hanya mendapatkan skor 45,29%. Kemudian indikator peningkatan implementasi pembelajaran yang berpusat pada siswa hanya mendapatkan skor 47,13%. Sedangkan indikator peningkatan peran serta masyarakat terhadap pendidikan di sekolah menengah atas mendapatkan skor terendah, yaitu hanya sebesar 39,84%.

Hasil evaluasi penerapan manajemen berbasis sekolah di atas ternyata tidak berbeda jauh dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Atas dan Perguruan Tinggi yang diwakilkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (2022) yang melaporkan bahwa, pada aspek transparansi masih jauh dari harapan, yaitu dengan rata-rata sebesar 37,24%. Aspek partisipatif memperoleh skor 49,81%, aspek demokratis mencapai angka 59,77%, sedangkan untuk aspek akuntabel hanya mencapai angka 43,22%. Untuk indikator yang berkaitan dengan implementasi pembelajaran hanya diperoleh skor 54,12%, dan untuk indikator peran serta masyarakat hanya sebesar 41,12%.

Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari (2022) diarahkan pada 19 Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Kabupaten Batanghari. Apabila laporan hasil evaluasi implementasi MBS yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari dikaji lebih dalam, maka akan terlihat bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Batanghari merupakan sekolah dengan total hasil penilaian terendah, yaitu sebesar 59,16%. Sedangkan untuk hasil penilaian tertinggi diperoleh SMA Negeri 5 Batanghari, dengan rata-rata sebesar 85,12%. Sedangkan untuk hasil penilaian masuk dalam kategori sedang adalah SMA Negeri 4 Batanghari dengan skor 329 atau rata-rata sebesar 72,29%. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Penerapan MBS di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Batanghari Tahun 2022

No	Indikator Penilaian	Skor Hasil Penilaian		
		SMAN 5	SMAN 4	SMAN 7
1.	Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah	92.87	84.32	82.17
2.	Manajemen peserta didik berbasis sekolah	94.33	77.58	61.38
3.	Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan	85.44	74.29	43.81
4.	Manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah	80.63	68.45	59.24
5.	Manajemen pembiayaan berbasis sekolah	79.47	64.22	53.67
6.	Hubungan manajemen sekolah dan masyarakat berbasis sekolah	74.83	63.55	52.31
Total		595.82	506.07	414.11
Rata-rata		85.12	72.29	59.16
Kategori		Baik	Cukup Baik	Buruk

Sumber : Rapor Pemetaan Pendidikan Hasil Evaluasi Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022.

Menurut laporan hasil evaluasi implementasi MBS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari (2022) dijelaskan bahwa, rendahnya implementasi MBS di SMA Negeri di Batanghari disebabkan karena perencanaan dan pelaksanaan MBS tidak dilakukan secara transparan. Kepala sekolah kurang melibatkan partisipatif guru dan komponen sekolah yang lain, dan cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan pendapat dari pihak lain atau kurang demokratis. Proses pengambilan kebijakan yang terkesan tertutup tersebut telah menyebabkan implementasi MBS kurang dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas menjadi rendah. Implementasi pembelajaran juga masih lebih banyak berpusat pada guru, aktivitas guru lebih dominan dibandingkan dengan aktivitas siswa karena guru-guru masih menerapkan sistem pembelajaran konvensional. Kepala sekolah dalam mengambil kebijakan kurang melibatkan guru dan masyarakat atau orang tua siswa.

Menurut Nurkolis (2019) keberhasilan implementasi MBS sangat ditentukan oleh peran kepala sekolah sebagai orang yang diberikan tugas, kewenangan, dan tanggungjawab oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan mengatur segala yang dibutuhkan oleh sekolah secara mandiri (otonom) termasuk dalam pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan sekolah. Berkaitan dengan peran kepala sekolah, Usman (2016) menjelaskan bahwa, kepala sekolah memiliki delapan peran yang dikenal dengan istilah EMASLEM-C, yaitu *educator*/ pendidik; manajer; administrator; *supervisor*/ pengawas; *leader*/ pemimpin; *entre-preneur*/kewirausahaan; motivator; dan *climator*/pencipta iklim kerja. Delapan peran kepala sekolah tersebut dalam konsep MBS diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan sekolah. Melalui penerapan MBS, maka sekolah dalam penentuan dan pengambilan kebijakan lebih melibatkan seluruh komponen sekolah, artinya secara internal pengambilan kebijakan melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Secara eksternal melibatkan komite sekolah dan orang tua siswa, sehingga pengambilan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Kebijakan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah telah menjadi perhatian banyak pihak, termasuk para penelitian pendidikan yang telah melakukan kajian terhadap masalah tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Budiningsih (2021), dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten” menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan ada pengaruh

dan signifikan antara kepemimpinan, motivasi dan 10 lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Secara variabel berbeda, peneliti hanya fokus pada pola pengambilan keputusan.

Selanjutnya secara khusus Sudaryanto (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh pola Kepemimpinan Terhadap Kinerja Guru dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Jawa Timur” menyebutkan bahwa kepemimpinan dengan MBS dapat meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar. Sujoko (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Lingkungan Kerja dalam penerapan MBS terhadap Kinerja Guru SMU Negeri 3 Sukoharjo” menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan kepemimpinan kepala sekolah dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja guru SMU Negeri 3 Sukoharjo.

Berdasarkan masalah dan dukungan teori dari hasil penelitian tersebut di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang “ Peran Kepala Sekolah dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Batanghari “.

1.2 Identifikasi Masalah

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah belum optimal hal tersebut ditunjukkan dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Atas dan Perguruan Tinggi tahun 2021 yang menunjukkan skor untuk tiap-tiap indikator penilaian tidak lebih dari 50%. Demikian juga untuk hasil evaluasi yang dilakukan oleh

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, hasil evaluasi MBS hanya berkisar 46,29% - 76,85%. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari memperlihatkan bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Batanghari merupakan sekolah dengan total hasil penilaian terendah, yaitu sebesar 349 atau dengan rata-rata hasil penilaian sebesar 46,29%. rendahnya implementasi MBS di SMA Negeri 7 Batanghari disebabkan karena Kepala sekolah kurang melibatkan partisipatif guru dan komponen sekolah yang lain, dan cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan pendapat dari pihak lain atau kurang demokratis. Proses pengambilan kebijakan yang terkesan tertutup tersebut telah menyebabkan implementasi MBS kurang dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas menjadi rendah.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada dua hal berikut ini:

1. Lokasi penelitian dibatasi hanya di Sekolah Menengah Atas Negeri 2, SMA Negeri 4, dan SMAN Negeri 7 Batanghari. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil laporan evaluasi pelaksanaan MBS yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari yang menyatakan bahwa SMA Negei 7 Batanghari merupakan sekolah dengan capaian implementasi MBS terendah, SMA Negei 3 Batanghari merupakan sekolah dengan capaian implementasi MBS tertinggi, dan SMA Negei 4 Batanghari merupakan sekolah dengan capaian implementasi MBS dalam kategori sedang.
2. Penilaian peran kepala sekolah didasarkan model EMASLEM-C terpilih dengan menggunakan lima dari delapan indikator EMASLEM-C, yaitu

manajer; administrator; *supervisor*/ pengawas; *leader*/ pemimpin; dan *climator*/pencipta iklim kerja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi MBS di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Batanghari?
2. Bagaimana peran kepala sekolah dalam penerapan MBS di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Batanghari?
3. Faktor apa saja yang menghambat implementasi manajemen berbasis sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Batanghari?
4. Faktor apa saja yang mendukung implementasi manajemen berbasis sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Batanghari?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi MBS di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Batanghari.
2. Untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam penerapan MBS di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Batanghari.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi manajemen berbasis sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Batanghari.

4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung implementasi manajemen berbasis sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Batanghari.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Sebagai masukan untuk menambah perbendaharaan kepemimpinan kepala sekolah dalam penerapan MBS di Sekolah Menengah Atas.
- b. Sebagai penambah kepustakaan untuk hasil penelitian mengenai kepemimpinan kepala sekolah dalam penerapan MBS di Sekolah Menengah Atas.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini digunakan untuk menjadi pedoman bagi para kepala sekolah dan guru sebagai penguat teori kepemimpinan dalam penerapan MBS.
- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman, dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan kepemimpinan di tempat tugas.